

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT. Atas berkat dan rahmatNya Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Revisi terhadap Rencana Strategis ini pada intinya merupakan upaya penyelarasan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator sasaran strategis, strategi serta program dan kegiatan pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Merujuk pada sasaran dan target yang tercantum dalam Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, Pergub nomor 35 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, serta isu-isu strategis mengenai pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan ke depan, program dan kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terfokus dan terarah. serta dapat bersinergi dengan semua lembaga terkait. Sehingga prinsip efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dapat terlaksana.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renstra revisi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Purwakarta, Oktober 2014
KEPALA BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT

Ir. DEDDI MULYADI
NIP. 19580827 198603 1 014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.	8
2.2	Sumber Daya OPD	14
2.3	Kinerja Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.	19
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat	25
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	26
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
3.4	Penentuan Isu Strategis	32
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi	37
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
4.3	Strategi dan Kebijakan	43
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program	45
5.2	Kegiatan	47
5.3	Idikator Kinerja	53
BAB VII	PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat dimana Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat inti tugasnya adalah melaksanakan *koordinasi dan fasilitasi kewilayahan, sektoral, dan lintas sektoral* bidang pemerintahan, Pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya, serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsinya Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk jangka lima tahun (2013-2018), telah disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tentang visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program serta kegiatan untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan. Disusun dengan maksud sebagai acuan atau kerangka kerja bagi setiap elemen yang ada dilingkungan organisasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana program dan kegiatan pembangunan serta penganggaran, agar penggunaan seluruh sumber daya dan semua upaya yang dilakukan dapat lebih fokus, terarah dan terukur.

Menindaklanjuti Pergub Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 serta menyikapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan pembangunan serta memperhatikan bergarai peraturan serta kebijakan terutama yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat perlu untuk melaksanakan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018, Selain itu, revisi ini perlu dilakukan dengan pertimbangan atas arahan dari Tim asistensi dari Kemenpan RB yang berkaitan dengan penyusunan perjanjian kinerja yang mengisyaratkan bahwa rumusan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, serta target sasaran strategis dalam Renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya penyesuaian.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat 2013- 2018 adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
- Surat Edaran Gubernur Nomor 050/44/Bapp Tahun 2013 tentang Penyusunan Renstra OPD/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018.
- Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

1.3. Tujuan

Revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II bertujuan agar terwujudnya keterkaitan dan kesinambungan pola pikir antara visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa

Barat untuk jangka 5 (lima) tahun (2013-2018) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dengan adanya kejelasan keterkaitan antara semua komponen yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) akan lebih memudahkan kepada semua unsur yang berkepentingan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tahun 20013-2018 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengulas secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJM, Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan dengan Renja BKPP Wil.II Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, uraian tentang struktur organisasi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Uraian ini menjelaskan juga tentang jumlah personil dan tata laksana BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran/target Renstra BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang serta mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menjelaskan tugas dan fungsi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dijelaskan pula faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Isu Strategis.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis kewilayahan.

3.6. Analisis Lingkungan Strategis

BAB IV VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan tentang rumusan pernyataan visi dan misi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, secara umum dapat dikemukakan bahwa Badan Koordinasi Pemerintahan dan pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan dalam bidang *koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi* atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya yang meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun gambaran umum mengenai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Badan :

- a. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi :
 - 1). Penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan pembangunan daerah, perekonomian dan kesejahteraan sosial di wilayah II;

- 2). Pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan daerah, perekonomian dan kesejahteraan sosial di wilayah II;
- 3). Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Badan :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala badan mempunyai fungsi :
 - 1). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi meliputi kesekretariatan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial;
 - 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rincian Tugas Kepala Badan

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
- b. Menyelenggarakan program badan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesekretariatan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- e. Menyelenggarakan tugas teknis tertentu sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerjanya;

- g. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ badan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pelaporan pemasukan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa;
- j. Menyelenggarakan koordinasi fasilitasi dan monitoring pelaksanaan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar kab/kota dan lintas sektor di wilayah;
- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi kerjasama pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial antar kab/kota serta antara provinsi dengan kabupaten/kota;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala badan membawahkan sekretariat dan bidang sebagai berikut;

Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, Badan, pengkajian perencanaan dan program; pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Umum,
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1). Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan
 - 2). Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat
 - 3). Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan ketiga fungsi dimaksud sekretariat membawahkan:

- 1). Subbagian Perencanaan dan program;
- 2). Subbagian Keuangan
- 3). Subbagian Kepegawaian dan Umum

Bidang Pemerintahan

- a. Bidang Pemerintahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan otonomi daerah dan pemerintahan umum.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan memiliki fungsi:
 - 1). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah di wilayah II;
 - 2). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pemerintahan umum di wilayah II;
 - 3). Penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya dalam pelaksanaan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemerintahan membawakan :
 - 1). Subbidang Pelayanan Otonomi daerah
 - 2). Subbidang Pemerintahan Umum

Bidang Perekonomian

- a. Tugas pokok Bidang Perekonomian adalah menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan sarana perekonomian dan bina produksi,
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian di wilayah II;
 - 2). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas bina produksi di wilayah II;
 - 3). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian di wilayah II;

- 4). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas bina produksi di wilayah II.

c. Sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya Bidang Perekonomian membawahkan dua subbidang yakni:

- 1). Subbidang Sarana Perekonomian
- 2). Subbidang Bina Produksi

Bidang Pembangunan Daerah

a. Tugas pokok Bidang pembangunan Daerah adalah menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah,

b. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah II;
- 2). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayah II;
- 3). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah II;
- 4). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayah II.

c. Sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya Bidang Pembangunan Daerah membawahkan dua subbidang yakni:

- 1). Subbidang Infrastruktur
- 2). Subbidang Lingkungan Hidup

Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Tugas pokok Kesejahteraan Sosial adalah menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat,

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di wilayah II;

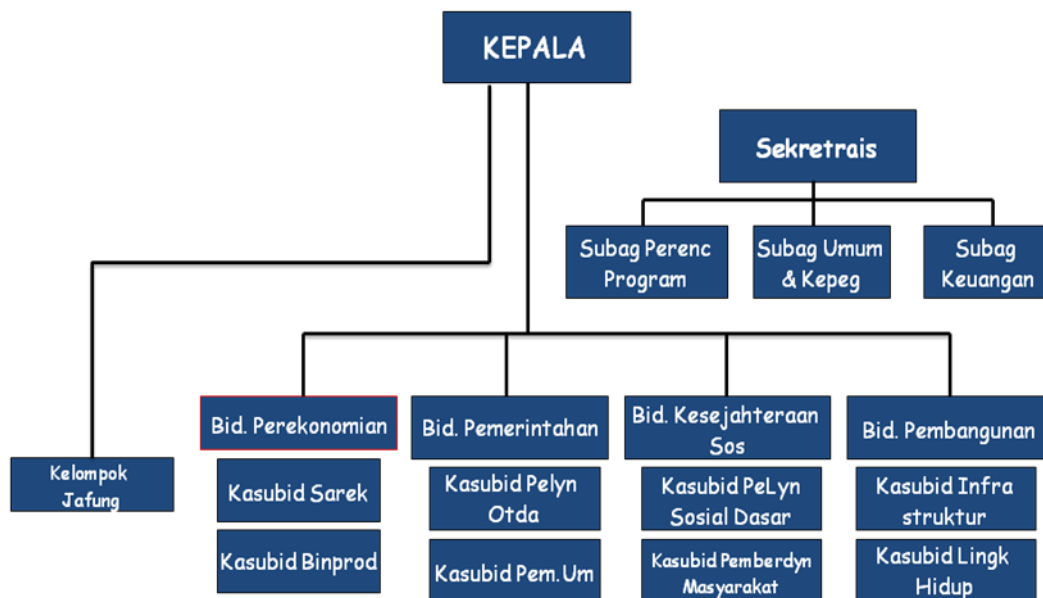
- 2). Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di wilayah II;
 - 3). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan sosial dasar di wilayah II;
 - 4). Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat di wilayah II.
- c. Sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi
- d. dua subbidang yakni:
- 1). Subbidang Pelayanan Sosial Dasar
 - 2). Subbidang Pemberdayaan masyarakat

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Pelayanan Otonomi Daerah
 2. Sub. Bidang Pemerintahan Umum
- d. Bidang Perekonomian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana Perekonomian
 2. Sub Bidang Bina Produksi
- e. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Infrastruktur
 2. Sub Bidang Lingkungan
- f. Bidang Kesos terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan Sosial Dasar
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Gambar Struktur Organisasi BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2009:



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Baik buruknya putaran roda organisasi ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang mutlak dibutuhkan dan memiliki peran sentral adalah sumber daya manusia. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2013 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sebanyak 46 Orang, seperti tergambar sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan/Pangkat

Komposisi pegawai sampai dengan Desember 2013 dilihat dari Pangkat/Golongan adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai di Lingkungan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013
berdasarkan Pangkat /Golongan ruang

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina / IVd	-
2.	Pembina Utama Muda / IVc	1 Orang
3.	Pembina Tk. I IVb	4 Orang
4.	Pembina / Iva	6 Orang
5.	Penata Tk. I / III d	6 Orang
7.	Penata / III c	1 Orang
8.	Penata Muda Tk. I / III b	7 Orang
9.	Penata Muda / III a	4 Orang
10.	Pengatur Tk. I / II d	-
11.	Pengatur / II c	-
12.	Pengatur Muda Tk. I / II b	8 Orang
13.	Pengatur Muda / II a	5 Orang
	Juru Tk I / Id	1 Orang
15.	Juru I/c	1 Orang
16.	Juru Muda Tk I / Ib	2 Orang
17.	Juru Muda / 1a	-
	J U M L A H	46 orang

b. Berdasarkan status kepegawaian

Dilihat dari setatus kepegawaian sumber daya manusia yang ada dilingkungan Badan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, tergambar pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Data Pegawai di lingkungan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun
2014
berdasarkan status kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1.	PNS	46 orang
2.	CPNS	orang

c. Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat berdasarkan Jabatan sampai dengan Bulan Desember tahun 2013 dapat terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai di Lingkungan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013
berdasarkan Jabatan

NO.	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	5 Orang
3.	Eselon IV	10 Orang
4.	Fungsional Umum	29 Orang
5.	Fungsional Khusus	1 Orang

e. Berdasarkan Pendidikan

Sampai dengan Bulan Desember tahun 2013 latar belakang pendidikan formal pegawai pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai di Lingkungan
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Bulan Desember Tahun
2014
berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S – 3	
2.	S – 2	10 Orang
3.	S – 1	13 Orang
4.	D – 3/Sarmud	
5.	SLTA	19 Orang
6.	SMP	1 Orang
7.	SD	3 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana penunjang BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat di tunjang oleh Sarana dan Prasarana seperti tertera pada table di bawah ini :

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana penunjang BKPP Wilayah II
Provinsi Jawa Barat

No	Sarana dan Prasarana :	Jumlah
1	Tanah: <ul style="list-style-type: none"> Tanah untuk bangunan Rumah Negara Gol II Tanah untuk bangunan kantor pemerintah 	1.285 m ² 21.487 m ²
2	Gedung: <ul style="list-style-type: none"> Gedung Kantor Permanen 	4 buah (3.433,59 m ²)

	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Kantor lain-lain Bangunan Gedung Pertemuan 	1 buah (16 m ²) 3 buah (1545,54 m ²)
	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Olahraga terbuka Permanen Bangunan Olahraga Lain-lain (lap. Tenis) Bangunan Pos Jaga Bangunan Gedung Garasi/Fool 	1 buah (1.444 m ²) 1 buah (74,75 m ²) 2 buah 3 buah (150 m ²)
	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Gedung Rumah Negara Gol II Type C Permanen 	1 buah (326,15 m ²)
3	<ul style="list-style-type: none"> Mess/Wisma/ permanen Alat Kantor dan Rumah Tangga: <ul style="list-style-type: none"> Mesin Tik Manual Filling Kabinet Penghancur kertas Whiteboard Kursi Zice Kursi Rapat Meja Rapat Meja Telepon Meja Podium Meja Tik Meja Panjang Kursi Tamu Kursi Tangan Kursi Putar Kursi Biasa Kursi lipat Meja Komputer Meja ½ biro Mesin Pemotong Rumput Lemari Pakaian Lemari Es AC Unit Kipas Angin Peawat Televisi Cassetererecorder Wireless Alat pemadam Portable Komputer PC Laptop dan notebook Printer 1. UPS 2. Unfocus 3. Layar 4. Kamera 	10 buah (298 m ²) 13 buah 27 buah 2 buah 12 buah 4 set 60 buah 50 buah 1 buah 1 buah 6 buah 1 buah 4 set 34 buah 44 buah 5 buah 503 buah 5 buah 61 buah 9 buah 5 buah 4 buah 37 unit 20 unit 5 buah 1 buah 3 buah 8 buah 48 unit 20 unit 45 buah 2 buah 2 buah 2 buah 1 buah
5	Sarana Mobilitas 5. Kendaraan Roda 4 6. Kendaraan Roda 2	15 buah 4 Buah
6	Fasilitas Ratel: 7. Pesawat telepon 8. Faximile 9. Radio Komunikasi	Unit 2 unit Unit

		Unit
7	Teknologi Informasi dan Komunikasi :	
	Infrastruktur TIK :	
	10. PC Server	2 unit
	11. Router	1 unit
	12. Switch Hub	8 unit
	13. Lan Card	8 unit
	14. Wireless hub	1 unit
	15. Jaringan	Kabel utv

2.3. Kinerja Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Kinerja adalah gambaran mengenai keluaran/hasil/ dari program/kegiatan yang telah/akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan indikator yang terukur.

Tugas Pokok dan Fungsi BKPP Wilayah II selama kurun waktu tahun 2008-2013 diaktualisasikan dalam sejumlah program dan kegiatan yang dipilih dan dituangkan dalam Renstra BKPP Wilayah II Tahun 2008-2013 dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Prosentase Pelaksanaan penyelenggaraan Forum komunikasi/dialog antara BKPP Wil II dengan unsur-unsur pemerintah daerah se Wilayah II;
2. Prosentase Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Pemerintahan;
3. Prosentase Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Perekonomian;
4. Prosentase Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Kesejahteraan Sosial;
5. Prosentase Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Pembangunan;
6. Meningkatnya kinerja aparatur berbasis kompetensi;
7. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2008-2013 Pencapaian kinerja pelayanan BKPP Wilayah II dapat dilihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKPP Wil. II Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Forum komunikasi/dialog antara BKPP Wil II dengan unsur-pemerintah daerah se Wilayah II;		100%					50%	100%				50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Pemerintahan;		100%		70%	80%	90%	95%		70%	80%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Pembangunan;		100%		70%	80%	90%	95%		70%	80%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Perekonomian;		100%		65%	70%	80%	90%		65%	70%	80%	90%		100%	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya kinerja aparatur berbasis kompetensi		100%		80%	85%	90%	95%		80%	85%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	
6	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.		100%		80%	85%	90%	95%		80%	85%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	

Dari Tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II periode sebelumnya sampai dengan Tahun ke 4 rasio capaian rata-rata 100 % demikian halnya dengan tahun ke 5 diharapkan capaian kinerja tetap 100%.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah II Provinsi Jawa Barat**

Nama OPD :

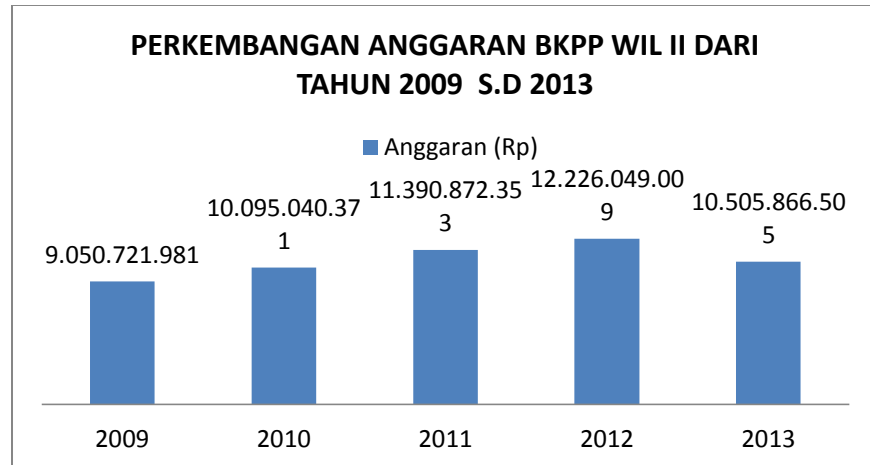
Lembar :
dari.....

	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil retribusi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana alokasi umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana alokasi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	9.050.721.981	10.095.040.371	11.390.872.353	12.226.049.009	10.505.866.505	8.505.013.922	8.820.353.053	9.963.535.140	11.493.721.711	10.264.719.444	545.713.059	1.274.617.318	1.427.337.213	732.327.298	241.147.061	11,34%	-1,57%
Belanja tidak langsung	2.984.533.481	5.494.140.371	5.887.579.853	6.132.633.509	6.270.686.666	2.878.487.468	5.187.134.083	5.411.856.540	5.500.463.497	5.903.617.449	106.046.013	307.006.288	475.723.313	632.170.012	367.069.217	84,09%	-2,03%
- Belanja pegawai	2.984.533.481	5.494.140.371	5.887.579.853	6.132.633.509	6.270.686.666	2.878.487.468	5.187.134.083	5.411.856.540	5.500.463.497	5.903.617.449	106.046.013	307.006.288	475.723.313	632.170.012	367.069.217	84,09%	-2,03%
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

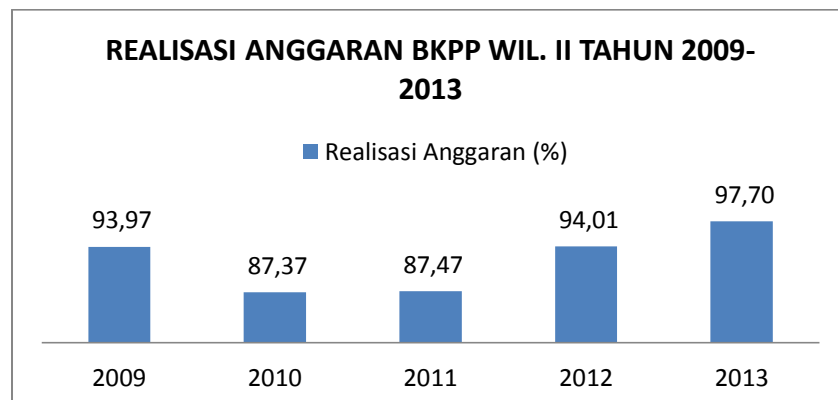
	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja langsung	6.066.188.500	4.600.900.000	5.503.292.500	6.093.415.500	10.505.866.505	5.626.526.454	3.633.218.970	4.551.678.600	5.993.258.214	10.264.719.444	421.397.046	967.611.030	951.613.900	100.157.286	241.147.061	-24,16%	-13,78%
- Belanja pegawai	980.302.500	271.092.500	260.328.000	347.319.000	735.743.000	923.728.500	235.798.500	224.265.000	340.795.000	712.582.800	39.299.000	35.294.000	36.063.000	6.524.000	23.160.200	-72,35%	-7,25%
- Belanja barang dan jasa	4.874.713.500	4.054.759.500	4.948.254.500	5.465.951.000	7.227.596.505	4.493.149.304	3.132.007.470	4.033.568.600	5.378.153.214	7.009.859.644	380.569.196	922.682.030	914.685.900	87.797.786	217.736.861	-16,82%	-14,93%
- Belanja modal	211.172.500	275.048.000	294.710.000	280.145.500	2.542.527.000	209.643.650	265.413.000	293.845.000	274.310.000	2.542.277.000	1.528.850	9.635.000	865.000	5.835.500	250.000	30,25%	-2,78%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.050.721.981	10.095.040.371	11.390.872.353	12.226.049.009	10.505.866.505	8.505.013.922	8.820.353.053	9.963.535.140	11.493.721.711	10.264.719.444	545.713.059	1.274.617.318	1.427.337.213	732.327.298	241.147.061	11,34%	-1,57%

Dari Tabel 2.7 dapat terlihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun ke-1 (2009) anggaran untuk tahun kedua (2010) naik sebesar 11,34% dari Rp 9.050.721.981,- menjadi Rp 10.095.040.371,-. Demikian halnya pada tahun ketiga dan tahun keempat masing-masing naik 12,84 dan 7,33%, namun pada tahun kelima turun kembali sebesar 14,07%.



Prosentase Realisasi Anggaran dari tahun 2009-2013 masing-masing: Realisasi Anggaran Tahun 2009, 93,97%; Tahun 2010, 87,37%; Tahun 2011, 87,47%; Tahun 2012, 94,01; dan Tahun 2013, 97,70%.

Realisasi pada tahun 2010 dan tahun 2011 terlihat agak rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 dan tahun 2011 masih terdapat kegiatan “Mitigasi Bencana: dengan anggaran cukup besar yang tidak terserap karena pada tahun-tahun yang bersangkutan di Wilayah II Tidak terjadi bencana dengan skala besar.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni memberikan pelayanan Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, dipilah ke dalam dua aspek kajian yaitu:

1. Aspek Koordinasi Antar kabupaten/kota juga antara provinsi dengan Kab./Kota.
2. Aspek Koordinasi pembangunan antara kab/kota serta antara provinsi dengan kabupaten kota.

Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelaksanaan tugas /Pelayanan BKPP
			Internal (Kewenangan BKPP)	External (Di Luar Kewenangan BKPP)	
1	2	3	4	5	6
1.Koordinasi Antar kabupaten/kota juga antara provinsi dengan Kab./Kota.	1.Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah II masih belum optimal 2.Sinergitas dan pencapaian target indikator kinerja Provinsi Jawa Barat belum optimal	RPJMD dan RKPDP	1.Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia .2.Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas	1. Terbatasnya anggaran operasional 2. masih lemahnya koordinasi dengan pemerintahan kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan	1. Koordinasi pemerintahan dan pembangunan belum optimal 2. Adanya koordinasi langsung kabupaten/kota di wilayah II ke Pemprov. Jabar (tanpa melalui BKPP) melemahkan fungsi BKPP

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan rumusan-rumusan tentang apa yang dicita-citakan serta apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya, yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah program pembangunan yang diprioritaskan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2013-2018.

3.2.1 Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Cita-cita besar yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu tahun 2013 – 2018 dirumuskan dalam sebuah Visi yaitu : **"JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA "**.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

MAJU berarti :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

SEJAHTERA berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat
3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA berarti :

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia
4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

3.2.2 Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, dalam rangka mencapai cita-cita/visi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera ditetapkan lima langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kelima langkah tersebut dirumuskan dalam 5 (lima) Misi, yaitu :

Misi Pertama, **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing**. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada tahun 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat,cerdas,bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi serta didukung oleh ketahanan keluarga yang kokoh.

Misi Kedua, **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada tahun 2018, yaitu menciptakan kondisi Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha,

berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.** Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada tahun 2018, yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, **Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.** Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada tahun 2018, yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, **Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.** Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada tahun 2018, yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal

Badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk ikut berperan serta mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya melalui dukungan dalam pelaksanaan program-program yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPP Wilayah II Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	Misi 3 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Belum semua pemangku kepentingan mengetahui ttg rintisan Wajar 12 tahun	Kurangnya sosialisasi ttg Prog. Wajar 12 tahun; mahal biaya pendidikan; tingkat social ekonomi masyarakat	Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak. Pakar pendidikan sebagai narasumber tentang program Wajar
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Banyaknya potensi wisata ziarah yang belum tergalai dan terkelola serta terpromosikan	belum optimalnya kerjasama antara instansi terkait dengan investor	masyarakat dengan budaya ziarah yang masih kuat, merupakan pasar (domestik/local) potensial
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Sarana untuk pengembangan Perikanan ikan tangkap Masih kurang	kemampuan masyarakat untuk membangun sarpras perikanan masih rendah	Purwasukasi dilewati sungai-sungai besar, dan lahan peruntukan tambak potensial
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Masih banyaknya Masyarakat pesisir/nelayan yang berpenghasilan rendah	Factor social budaya masyarakat	Purwasukasi dilewati sungai-sungai besar, memiliki laut dan bentangan pantai cukup panjang

	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang produk dalam negeri	Kurangnya minat /kebanggaan masyarakat terhadap produk dalam negeri	Banyak produk dalam negeri dengan harga kualitas dan bersaing
	Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Masih sering munculnya eksekusi dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan ego sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pentingnya koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Kerjasama Pembangunan	Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan ego sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan ego sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Penguatan Otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah	Pentingnya koordinasi dan fasilitasi dan sinkronisasi dalam penataan batas wilayah; pelaksanaan otda; penyelenggaraan pemulu/pilkadapengawasan dan penguatan keg. Perekonomian, serta penanganan aspek sosial budaya dan kesra.	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan ego sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	masih sering adanya kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum	Disiplin dan kesadaran hukum serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rata-rata masih rendah;	Peranan Aparat Kamtib serta peran masyarakat
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan	Pentingnya koordinasi dan fasilitasi dan sinkronisasi peningkatan Infrastruktur pendukung pertanian (irigasi, jalan menuju lokasi produsen)	Komunikasi masih kurang, masih adanya ego daerah dan ego sektoral	Kewenangan BKPP Wil II untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan
	Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Daerah Purwasukasi termasuk daerah rawan bencana	Faktor alam yang sulit diprediksi	Tersedianya dana tanggap darurat dari pemerintah daerah Prov. Jabar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pentingnya penataan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kualitas dan kuantitas SDM	Adanya fasilitas dengan basis IT
	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Perlunya koordinasi, fasilitasi, Evaluasi dan Monitoring terhadap DBHCT		Dukungan SDM untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, Evaluasi dan Monitoring terhadap DBHCT

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Tupoksi sering terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana kantor	Keterbatasan anggaran	Kesiapan SDM untuk mengoptimalkan sarana prasarana yang ada
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Tupoksi sering terhambat oleh kondisi sarana dan prasarana kantor tidak siap pakai	Kerusakan sarana prasarana kantor kadang tidak terduga	Kesiapan SDM untuk mengoptimalkan sarana prasarana yang ada
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pentingnya layanan administrasi perkantoran dalam kelancaran pelaksanaan tupoksi		
	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	kinerja aparatur desa dan kecamatan masih perlu ditingkatkan serta perlunya koordinasi dan monitoring terhadap bantuan gubernur ke desa-desa	Terbatasnya dana untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur desa dan kecamatan	Narasumber
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap karya seni daerah	Terbatasnya dana untuk memfasilitasi pementasan hasil karya seni daerah	Semangat para seniman untuk terus berkarya
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Perlunya Koordinasi,fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu dan pilkada	Terbatasnya dana untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan pemilu dan pilkada	Animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L di Wilayah II beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN RENSTRA K/L			

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota di Wilayah II beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TIDAK ADA OPD DI KAB./KOTA DENGAN TUPOKSI YANG SAMA DENGAN BKPP WILAYAH II				

3.4 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Untuk itu Untuk lima tahun ke depan 2013-2018 terdapat sejumlah isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yang perlu mendapat perhatian BKPP Wilayah II yaitu:

1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
2. Pencegahan penyakit menular (TBC, Hepatitis C, HIV-AIDS)
3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS
4. Pengangguran dan lapangan kerja
5. Pelestarian budaya dan destinasi wisata
6. Adaptasi dan mitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
7. Pembangunan sarana Olahraga dan Seni
8. Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian budaya lokal
9. Perbaikan Jalan Kabupaten / Kota bersama Dunia Usaha, Persampahan, Rutilahu dan air bersih Pantura
10. Pengembangan transportasi massal perkotaan, terminal, Multi Moda serta Infrastruktur Antar Kawasan Industri
11. Kawasan industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, Transportas) untuk solusi Kesejahteraan

12. Pembangunan pelabuhan laut Patimban
13. Manajemen Desa Pesisir Utara.
14. Kualitas Demokrasi, pemilu dan pemilukada
15. Pengendalian Laju Migrasi Penduduk Kab / Kota
16. Penataan dan Pembangunan Metropolitan BODEBEK KARPUR
17. Peningkatan Daya Beli
18. Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
19. Pengendalian lahan sawah berkelanjutan

Untuk menentukan prioritas penanganan terhadap kedua kelompok isu strategis tersebut di atas, maka dilakukan penilaian dengan menggunakan metode pembobotan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama ditentukan Skor Penentuan Isu-isu Strategis seperti tercantum dalam table 3.6

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

1. Menentukan Skala Kriteria dengan menggunakan skala likert yang terdiri atas tiga kelompok yakni:

1	Rendah
2	Sedang
3	Tinggi

2. Melakukan penilaian terhadap setiap isu strategis dengan mengalikan bobot dari setiap kriteria terhadap nilai skala likert yang dipilih. Hasilnya dituangkan ke dalam tabel Nilai Skala Kriteria (table 7 untuk kelompok isu strategis Kewilayahan dan table 9 untuk kelompok isu strategis Pembangunan Jawa Barat)
3. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria (6 kriteria), kemudian hasilnya dituangkan ke dalam tabel Rata-rata Skor isu

strategis (table 8 untuk kelompok isu strategis kewilayahan dan table 10 untuk kelompok isu strategis Pembangunan Jawa Barat)

4. Menentukan prioritas isu strategis dengan melihat urutan rata-rata skor.

3.5.1 Hasil Penilaian terhadap 12 Isu Strategis Kewilayahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	60	20	60	30	15	75		260
2	Pencegahan penyakit menular (TBC, Hepatitis C, HIV-AIDS)	60	30	60	30	15	60		255
3	Penanganan Kemiskinan dan PMKS	60	10	55	20	30	25		200
4	Pengangguran dan lapangan kerja	40	10	20	10	15	25		120
5	Pelestarian budaya dan destinasi wisata	60	30	50	30	30	50		250
6	Adaptasi dan mitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	20	10	20	10	15	25		100
7	Pembangunan sarana Olahraga dan Seni	40	20	20	10	30	25		145
8	Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian budaya local	60	20	40	20	15	55		200
9	Perbaikan Jalan Kabupaten / Kota bersama Dunia Usaha, Persampahan, Rutilahu dan air bersih Pantura	60	20	40	30	15	50		195
10	Pengembangan transportasi massal perkotaan, terminal, Multi Moda serta Infrastruktur Antar Kawasan Industri	20	10	20	10	15	25		100
11	Kawasan industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, Transportas) untuk solusi Kesejahteraan	60	20	40	20	15	50		195
12	Pembangunan pelabuhan laut Cilamaya.	60	30	60	30	30	35		245
13	Manajemen Desa Pesisir Utara.	50	20	55	30	15	60		230
14	Kualitas Demokrasi, pemilu dan pemilukada	60	40	35	25	20	45		220
15	Pengendalian Laju Migrasi Penduduk Kab / Kota	30	10	20	20	15	25		120
16	Penataan dan Pembangunan Metropolitan BODEBEK KARPUR	60	20	50	40	15	75		260
17	Peningkatan Daya Beli	50	20	30	20	15	40		175
18	Pengendalian lahan sawah berkelanjutan	20	10	20	10	20	25		105

Tabel 3.8
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Kewilayahan

No	Isu Strategis	Total Skor	
----	---------------	------------	--

1	2	3	4
1	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	260	52.00
2	Penataan dan Pembangunan Metropolitan BODEBEK KARPUR	260	52.00
3	Pencegahan penyakit menular (TBC, Hepatitis C, HIV-AIDS)	255	51.00
4	Pelestarian budaya dan destinasi wisata	250	50.00
5	Pembangunan pelabuhan laut Cilamaya.	245	49.00
6	Manajemen Desa Pesisir Utara.	230	46.00
7	Kualitas Demokrasi, pemilu dan pemilukada	220	44.00
8	Perbaikan Jalan Kabupaten / Kota bersama Dunia Usaha, Persampahan, Rutilahu dan air bersih Pantura	205	41.00
9	Penanganan Kemiskinan dan PMKS	200	40.00
10	Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian budaya lokal	200	40.00
11	Kawasan industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, Transportas) untuk solusi Kesejahteraan	195	39.00
12	Peningkatan Daya Beli	175	35.00
13	Pembangunan sarana Olahraga dan Seni	145	29.00
14	Pengangguran dan lapangan kerja	120	24.00
15	Pengendalian Laju Migrasi Penduduk Kab / Kota	120	24.00
16	Pengendalian lahan sawah berkelanjutan	105	21.00
17	Adaptasi dan mitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	100	20.00
18	Pengembangan transportasi massal perkotaan, terminal, Multi Moda serta Infrastruktur Antar Kawasan Industri	100	20.00

Hasil dari penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa isu strategis kewilayahan yang menjadi prioritas Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dapat diurutkan sebagai berikut:

No	Isu Strategis
1	2
1	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
2	Penataan dan Pembangunan Metropolitan BODEBEK KARPUR
3	Pencegahan penyakit menular (TBC, Hepatitis C, HIV-AIDS)
4	Pelestarian budaya dan destinasi wisata
5	Pembangunan pelabuhan laut Cilamaya.
6	Manajemen Desa Pesisir Utara.
7	Kualitas Demokrasi, pemilu dan pemilukada
8	Perbaikan Jalan Kabupaten / Kota bersama Dunia Usaha, Persampahan, Rutilahu dan air bersih Pantura
9	Penanganan Kemiskinan dan PMKS
10	Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian budaya lokal
11	Kawasan industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, Transportas) untuk solusi Kesejahteraan

12	Peningkatan Daya Beli
13	Pembangunan sarana Olahraga dan Seni
14	Pengangguran dan lapangan kerja
15	Pengendalian Laju Migrasi Penduduk Kab / Kota
16	Pengendalian lahan sawah berkelanjutan
17	Adaptasi dan mitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
18	Pengembangan transportasi massal perkotaan, terminal, Multi Moda serta Infrastruktur Antar Kawasan Industri

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi lembaga, kemudian memperhatikan isu-isu strategis yang muncul, serta mempertimbangkan kondisi riil lembaga dan lingkungan organisasi yang ada, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat merumuskan Visi, Misi, dan Sasaran, serta Strategi juga Kebijakan sebagai berikut:

4.1. VISI dan MISI

Visi

Visi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan wilayah II adalah rumusan tentang gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, yaitu:

“ MENJADI MOTIVATOR DAN PENYELARAS TATA KELOLA KE – PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT 2018”

Penjabaran makna dari visi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II tersebut adalah sebagai berikut:

Motivator dapat diartikan bahwa BKPP II hendaknya menjadi pendorong pembangunan bagi kab/kota di wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Penyelaras bahwa BKPP II hendaknya dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kabupaten/Kota dalam menentukan arah dan

kebijakan pembangunannya sehingga diharapkan selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018.

Tata Kelola Ke-Pemerintahan Dan Pembangunan artinya Kegiatan – kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang ada di BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat mulai dari proses *perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi* dilaksanakan melalui prinsip-prinsip manajemen secara professional dan proporsional.

Dengan kata – Kata kunci tersebut diatas (*Motivator, Penyelaras dan Tata Kelola Ke-Pemerintahan dan Pembangunan*), BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat dapat lebih membuktikan peranan dan keberadaannya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Misi

Misi adalah rumusan yang berfungsi sebagai penjabar jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat menetapkan rumusan misi sebagai berikut :

Misi Kesatu : Medorong terwujudnya sinergitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Misi Kedua : Menciptakan kelembagaan BKPP II yang kuat dan profesional melalui peningkatan tatakelola lembaga dan kualitas sumberdaya aparatur.

4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Rumusan tujuan dibuat untuk menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran merupakan gambaran tentang hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah

dirumuskan. Rumusan tujuan, sasaran serta kaitannya dengan visi dan misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Medorong terwujudnya sinergitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Tujuan Misi Pertama :

Mengoptimalkan proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan Indikator:

1. Prosentasi jumlah kendala yang dapat diatasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II 90%
2. Deviasi antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan dalam pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II kurang dari 10%

Sasaran Misi Pertama:

Rumusan Semula

Terciptanya Sinkronisasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

Untuk tahun 2014 berubah menjadi:

Meningkatkan Kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota di bidang: Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II

Pada Tahun 2015 Rumusan tersebut Kembali berubah menjadi dua sasaran:

- Meningkatkan sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
- Meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Indikator Sasaran Misi Pertama :

Rumusan Semula

- Prosentase keberhasilan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi

dalam bidang pemerintahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

- Prosentase keberhasilan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bidang perekonomian di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
- Prosentase keberhasilan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bidang pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
- Prosentase keberhasilan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi dalam bidang kesejahteraan sosial di Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Untuk tahun 2014 Berubah menjadi:

- Prosentase Keberhasilan koordinasi dan fasilitasi di wilayah II : pemerintahan; perekonomian; pembangunan; dan kesejahteraan sosial
- Prosentase sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan lintas 5 (lima) Kabupaten/Kota di Wilayah II

Pada Tahun 2015 Rumusan tersebut Kembali berubah menjadi:

- Jumlah Kesepakatan dalam Bidang : Pemerintahan; Pembangunan; Perekonomian; Kesejahteraan Sosial; Sektoral
- Jumlah Rekomendasi dalam Bidang : Pemerintahan; Pembangunan; Perekonomian; Kesejahteraan Sosial; Sektoral

Misi Kedua : Menciptakan kelembagaan BKPP II yang kuat dan profesional melalui peningkatan tatakelola lembaga dan kualitas sumberdaya aparatur.

Tujuan Misi Kedua :

Mewujudkan kelembagaan BKPP Wilayah II yang Profesional dan akuntabel.

Semula Sasaran Misi Kedua terdiri dari :

- Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan capaian kinerja Program dan Kegiatan internal BKPP Wil II
- Terpenuhinya kebutuhan aparatur BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dari segi keahlian dan kompetensinya
- Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai baik jumlah dan kualitas

Tahun 2014 berubah menjadi :

- Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta dokumen evaluasi dan pelaporan internal BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat
- Ketersediaan Data Informasi Statistik Pembangunan Jawa barat Wilayah II Provinsi Jawa Barat
- Prosentase Peningkatan profesionalisme Aparatur BKPP WIL II
- Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- Jumlah rekomendasi hasil Forum BKPP

Pada Tahun 2015 Rumusan Sasaran misi ke dua tersebut kembali berubah menjadi:

- Tersedia dan termanfatkannya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja Program dan Kegiatan internal BKPP Wil II

dengan Indikator :

Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta dokumen evaluasi dan pelaporan internal BKPP Wil II

- Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dari segi jumlah dan kompetensinya

Dengan Indikator:

Prosentase pegawai yang diikutsertakan dalam dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, seminar, diklat dll

- Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas

dengan Indikator:

- 1). Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm Perkantoran
- 2). Prosentase realisasi Pengadaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3). Prosentase Realisasi Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Perlu dijelaskan bahwa sasaran dan indikator sasaran misi ini dijadikan sebagai Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Visi “ Menjadi Motivator dan Penyelaras Tata Kelola Ke-Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat”									
Misi 1 : Medorong sinergitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat									
1.	Mengoptimalkan proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.		Meningkatkan Kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota di bidang: Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II	Prosentase Keberhasilan koordinasi dan fasilitasi di wilayah II : pemerintahan; perekonomian; pembangunan; dan kesejahteraan sosial	80	85			
			Meningkatkan Kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota di bidang: Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II	Prosentase Keberhasilan koordinasi dan fasilitasi di wilayah II : pemerintahan; perekonomian; pembangunan; dan kesejahteraan sosial	80	85			
		1. Prosentasi jumlah kendala yang dapat diatasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II			75	80	85	90	95
				Prosentase sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan lintas 5 (lima) Kabupaten/Kota di Wlayah II	50	60			
		2. Prosentse deviasi antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan dalam pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II			15	12	10	7	5
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan da Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Rekomendasi dalam Bidang : Pemerintahan; Pembangunan; Perekonomian; Kesejahteraan Sosial;			20	20	20
			Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Kesepakatan dalam Bidang : Pemerintahan; Pembangunan; Perekonomian; Kesejahteraan Sosial;			2	2	2

Misi 2: Menciptakan kelembaga BKPP II yang kuat dan professional melalui peningkatan tatakelola lembaga dan kualitas sumberdaya aparatur									
2.	Mewujudkan kelembagaan BKPP Wilayah II yang Profesional dan akuntabel	Tingkat Capaian Kinerja progrsm/krigsnsn dsn keuangan	Tersedia dan termanfatkannya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja Program dan Kegiatan internal BKPP Wil II	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta dokumen evaluasi dan pelaporan internal BKPP Wil II	100	100	100	100	100
		Tingkat pemenuhan kebutuhan Sumberdaya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dari segi jumlah dan kompetensinya	Prosentase pegawai yang diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, seminar, diklat dll	100	100	100	100	100
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm Perkantoran	100	100	100	100	100
				Prosentase realisasi Pengadaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100
				Prosentase Realisasi Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah rumusan yang menggambarkan langkah-langkah dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan berubahnya rumusan dan indikator sasaran strategis/Renstra maka strategi pencapaian sasaranpun harus menyesuaikan. Sehubungan dengan itu maka secara garis besar strategi yang dipilih oleh Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2016 s.d 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev pelaksanaan Pembangunan Tematik Sektoral di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
2. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev pelaksanaan Pembangunan Tematik Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat

3. Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan, dan Pelaporan Capaian kinerja Program/Kegiatan dan Keuangan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku
4. Penyertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Latihan;
5. Penyelenggaraan kegiatan Olahraga dan Kerohanian bagi pegawai
6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Prioritas Kebutuhan
8. Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Mengingat kedudukan dan tugas pokok serta fungsi BKPP Wilayah II sebagai kepanjangan tangan Gubernur di wilayah, terutama dalam mengkoordinasikan, memberikan fasilitasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah. Ini berarti bahwa pencapaian tujuan dan sasaran renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat terkait dengan sejumlah kebijakan meskipun secara khusus terfokus pada aspek ***koordinasi, fasilitasi, monitoring*** dan ***evaluasi***. Oleh karena itu dengan melihat tujuan, sasaran dan indikator sasaran renstra yang dirumuskan maka kebijakan-kebijakan yang terkait dan merupakan arah/pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran sasaran renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat meliputi :

1. Optimalisasi Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tematik sektoral di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
2. Optimalisasi Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tematik kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
3. Peningkatan nilai capaian kinerja program/kegiatan serta keuangan
4. Peningkatan Pengetahuan, keterampilan dan disiplin aparatur
5. Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani pegawai
6. Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor
7. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor
8. Optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* Menjadi Motivator dan Penyelaras Tata Kelola Ke-Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat*					
Misi 1 : Medorong terwujudnya sinergitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat					
1.	Mengoptimalkan proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat.	1. Prosentasi jumlah kendala yang dapat diatasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev pelaksanaan Pembangunan Tematik Sektoral di Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Optimalisasi Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tematik sektoral di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
		2. Prosentse deviasi antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan dalam pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II	Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev pelaksanaan Pembangunan Tematik Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Optimalisasi Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tematik kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
Misi 2: Menciptakan kelembaga BKPP II yang kuat dan professional melalui peningkatan tatakelola lembaga dan kualitas sumberdaya aparatur					
	Mewujudkan kelembagaan BKPP Wilayah II yang Profesional dan akuntabel	Tingkat Capaian Kinerja progrsm/krigistsn dsn keuangan	Tersedia dan termanfatkannya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja Program dan Kegiatan internal BKPP Wil II	Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan, dan Pelaporan Capaian kinerja Program/Kegiatan dan Keuangan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku	Peningkatan nilai capaian kinerja program/kegiatan serta keuangan
		Tingkat pemenuhan kebutuhan Sumberdaya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dari segi jumlah dan kompetensinya	Penyertaan Pegawai dalam Pendidikan dan Latihan;	Peningkatan Pengetahuan, keterampilan dan disiplin aparatur
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas	-Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Prioritas Kebutuhan -Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor	- Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor - Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor - Optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana Kantor

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan merupakan kerangka pikir lembaga yang harus diwujudkan melalui sejumlah program dan kegiatan dengan indikator dan kelompok sasaran tertentu beserta dukungan dana yang memadai

Oleh karena itu sesuai dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah 2013-2018 yang baru, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sampai tahun 2018 sebagai berikut:

5.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan dan berisi satu atau sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran renstra yang telah ditetapkan.

. Dalam imlementasi program-program pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 BKPP Wilayah II Provinsi memiliki tiga peran yakni:

Pertama sebagai OPD Utama artinya BKPP II bertanggungjawab penuh terhadap capaian indicator suatu program yang menjadi tanggungjawabnya; di mana program-program tersebut harus menjadi prioritas pertama;

Kedua sebagai OPD Mitra Utama, artinya BKPP II merupakan partner bagi OPD lain terhadap capaian indicator yang menjadi tanggungjawab OPD yang bersangkutan; dan ini dapat dikatakan sebagai prioritas kedua;

Ketiga sebagai OPD Pendukung, artinya BKPP II artinya BKPP II dapat memberikan dukungan atau support terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan OPD lain dalam rangka mencapai indikator program yang yang menjadi

tanggungjawab OPD bersangkutan, dan ini merupakan prioritas ketiga.

Oleh .karena itu, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu lima tahun sejak 2008-2013 menetapkan sejumlah rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
3. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

5.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program atau instrumen kebijakan dan program yang terdiri atas sekumpulan rencana tindakan pengerahan sumber daya dalam rangka mencapai target indikator program yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rencana program yang telah dipilih Rencana kegiatan yang menjadi pilihan dan akan dilaksanakan oleh BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk lima tahun 20013-2018 adalah :

1. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan (Penyelenggaraan OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah di Wilayah II)

2. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan (Penyelenggaraan OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah di Wilayah II) Mengadakan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat
3. Fasilitasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR (TKW-25)
4. Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II
5. Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat
6. Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wilayah II Prov. Jabar
7. Koordinasi, Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat se Wil.II Prov. Jawa Barat
8. Koordinasi, Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wil.II Prov. Jawa Barat
9. Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar Kab./Kota Provinsi Jawa Barat
10. Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur di Wilayah II
11. Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab./Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat
12. Koordinasi Pengendalian dan Monev Pembangunan di Wil. II (Berbasis Kewilayahan)
13. Koordinasi Penanganan Keamanan Ketertiban di Wilayah II Provinsi Jawa Barat
14. Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Subang
15. Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab./Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat
16. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel di Wilayah II Provinsi Jawa barat
17. Fasilitasi, Koordinasi, dan monitoring Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 di wilayah II Provinsi Jawa Barat

18. Monitoring Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2015
19. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Ketahanan Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat
20. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perekonomian BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat
21. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)
22. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)
23. Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian HIV/AIDS
24. Revitalisasi POSYANDU dan Dana Operasional Kader POSYANDU
25. Koordinasi dan Fasilitasi Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan
26. Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta
27. Koordinasi Persiapan POSPEDA Provinsi Jawa Barat
28. Koordinasi Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wil. II Prov. Jabar
29. Pengembangan Industri Manufaktur (TKW -21)
30. Pengembangan Industri Keramik Gerabah (TKW-22)
31. Pendampingan Dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Bidang Perekonomian
32. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan Kabupaten/Kota
33. Pelestarian Obyek Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) di Wilayah II Prov. Jawa Barat

34. Operasional Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat
35. Merencanakan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36. Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II
37. Peningkatan Kemampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
38. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat
39. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air Kantor BKPP Wilayah II
40. Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang BKPP Wil. II
41. Mengadakan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat
42. Rehabilitasi Gedung Negara, Gedung Sekretariat, dan Gedung Ratel.
43. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BKPP Wil. II Termasuk dalam Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman Serta Pagar.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 5.1 (terlampir)

5.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja dibuat sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu indikator kinerja Renstra BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kegiatan BKPP Wilayah II

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan (Penyelenggaraan OTDA serta Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah di Wilayah II)	Dokumen Hasil Pembicaraan Pimpinan Daerah mengenai Perencanaan Pembangunan dan Sosialisasi Kebijakan tentang Pelaksanaan OTDA di Wilayah II Prov. Jabar		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
2	Koordinasi dan Pemanfaatan Persampahan di Kab./Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat	rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan pemanfaatan Persampahan di Kab./Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
3	Fasilitasi Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR (TKW-25)	Rekomendasi tentang Pengembangan Metropolitan BODEBEK KARPUR (TKW-25)		1 dok	1 dok				
4	Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat Wilayah II	Dokumen usulan kegiatan Pengembangan Program tematik Kewilayah di Wilayah II sebagai Bahan Pramusrenbang		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
5	Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Dokumen usulan Dokumen Kesepakatan kegiatan Hasil Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan di Wilayah II Bahan Musrenbang		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Provinsi							
6	Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wilayah II Prov. Jabar	Rekomendasi hasil rakor tentang pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wilayah II Prov. Jabar		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
7	Koordinasi, Peningkatan Apresiasi Sekolah Sehat se Wil.II Prov. Jawa Barat	Rekomendasi hasil rakor tentang pelaksanaan Koordinasi Persiapan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Wilayah II Prov. Jabar		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
8	Koordinasi, Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wil.II Prov. Jawa Barat	Rekomendasi hasil rakor tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
9	Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar Kab./Kota Provinsi Jawa Barat	Rekomendasi tentang Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar Kab/kota dan Provinsi di wilayah II		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
10	Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur di Wilayah II	Rekomendasi tentang hasil Monev Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah II		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
11	Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab./Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat	Rekomendasi tentang hasil Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab./Kota yang dibiayai APBD Prov. Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
12	Koordinasi Pengendalian dan Monev Pembangunan di Wil. II (Berkas Kewilayahan)	Rekomendasi tentang hasil Monev Pembangunan Berbasis Kewilayahan di Wil. II		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
13	Koordinasi Penanganan Keamanan Ketertiban di Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Rekomendasi tentang hasil Fasilitasi, Koordinasi, Penanganan Keamanan Ketertiban di Wilayah II Provinsi Jawa Barat			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4 dok
14	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Subang							
15	Koordinasi, Pengendalian dan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab./Kota yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Persampahan di Kab./Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
	Pemantauan Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten/Kota Wilayah II Provinsi Jawa Barat								
16	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel di Wilayah II Provinsi Jawa barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Wawasan Aparatur Desa di Wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
17	Fasilitasi, Koordinasi, dan monitoring Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 di wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi, dan monitoring Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 di wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok					1 dok
18	Monitoring Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karawang Tahun 2015	Dokumen Laporan Hasil Pemantauan Pemilukada Kabupaten			1 dok				1 dok
19	Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Ketahanan Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pangan BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
20	Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perekonomian BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perekonomian BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat					1 dok	1 dok	3 dok
21	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Koordinasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Wilayah II BKPP Provinsi Jawa Barat)		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Fasilitas. Koordinasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian (Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di Wilayah II Provinsi Jawa Barat))			1 dok				1 dok
23	Koordinasi dan Fasilitas Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian HIV/AIDS	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian HIV/AIDS					1 dok	1 dok	2 dok
24	Ketersediaan dokumen pelaksanaan Rapat Koordinasi POSYANDU dan Dana Operasional Kader POSYANDU	Ketersediaan dokumen pelaksanaan Rapat Koordinasi POSYANDU dan Dana Operasional Kader POSYANDU					1 dok	1 dok	2 dok
25	Koordinasi dan Fasilitas Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitas pameran Produk Unggulan Kab./Kota di Wil. Provinsi Jawa Barat					1 dok	1 dok	2 dok
26	Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Batas Wilayah		1 dok	1 dok				2 dok
27	Koordinasi Persiapan POSPEDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas Persiapan POSPEDA di Kab./Kotase Wilayah II Provinsi Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
28	Koordinasi Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wil. II Prov. Jabar	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas Gelar Karya Serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
29	Pengembangan Industri Manufaktur (TKW -21)	Jumlah Dokumen Kesepakatan hasil Pelaksanaan an Rapat Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Industri Manufaktur (TKW -21)		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	Pengembangan Industri Keramik Gerabah (TKW-22)	Jumlah Dokumen Kesepakatan hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Industri Keramik Gerabah (TKW-22)		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
21	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan hasiln Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan Kabupaten/Kota			1 dok				1 dok
32	Pendampingan Dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kesepakatan Hasil Pendampingan Dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Bidang Perekonomian					1 dok	1 dok	2 dok
33	Pelestarian Obyek Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) di Wilayah II Prov. Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kesepakatan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Pelestarian Obyek Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) di Wilayah II Prov. Jawa Barat		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
34	Operasional Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Fasilitas Operasional Advisor Sinergi Pembangunan		1 dok	1 dok				2 dok
35	Merencanakan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Internal BKPP Wil. II		26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	130 dok
36	Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II	Jumlah buku dan display Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II		50 buku; 15 display	50 buku; 7 display	50 buku; 7 display	50 buku; 7 display	50 buku; 7 display	250 buku; 53 display
37	Peningkatan Kemampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang/pegawai yang diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, seminar, diklat dll		100%	100%	100%	100%	100%	
38	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat								
39	Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air Kantor BKPP Wilayah II	Kesinambungan Pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi Perkantoran , Daya listrik dan Air		100%	100%	100%	100%	100%	
40	Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang BKPP Wil. II	Prosentase Penyelesaian Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang BKPP Wil. II		100%					100%
41	Mengadakan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat		100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Rehabilitasi Gedung Negara,Gedung Sekretariat,dan Gedung Ratel.	Prosentase Penyelesaian Rehabilitasi Gedung Negara, Sekretariat dan ratel BKPP Wilayah II Prov. Jabar			100%				100%
43	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BKPP Wil. II Termasuk dalam Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman Serta Pagar.	Prosentase Penyelesaian Rehasbilitasi Gedung Sekretariat Kantor BKPP Wilayah II termasuk Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman serta Pagar		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BKPP WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013-2018

Dalam pelaksanaan program - program pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, khususnya di wilayah II Provinsi Jawa Barat BKPP memiliki peran :

1. sebagai OPD utama, artinya bertanggung jawab langsung secara penuh dalam pencapaian target seperti yang tercantum dalam RPJMD, di antaranya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Sasaran “ Sinergi kewilayahan dan lintas daerah”
2. Sebagai OPD Mitra Utama dan OPD Pendukung artinya bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawab utama OPD lain. Seperti program-program dilaksanakan dalam bidang Pendidikan; Kesehatan, perekonomian infrastruktur, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial dll .

Indikator kinerja BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang secara langsung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SEBAGAI OPD UTAMA							
1	Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat	NA	50	60	70	80	90	90
2	Implementasi tematik kewilayahan oleh Kabupaten/Kota se- Jawa Barat	NA	50	60	70	80	90	90

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau Renstra Organisasi perangkat daerah atau disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, adalah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

Renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan wilayah II Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi pedoman dan arah bagi seluruh komponen Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dalam mewujudkan Visi dan Misi lembaga melalui pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam renstra ini perlu didukung oleh kemampuan dan loyalitas segenap komponen Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilandasi pemahaman dan komitmen bersama.

[illegible]

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KET.		
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun - 5 (2018)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																		Bidang KESOS			
																				Bidang KESOS	formulasi

[illegible]

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KET.			
											Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)				Tahun - 5 (2018)		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1		2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Koordinasi Peningkatan Pelayanan Sosial Daerah Perbatasan dalam rangka Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Wil.II Prov. Jawa Barat								71.250.000						Bidang Kesos	
								Koordinasi Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wil. II Prov. Jabar	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas Gelar Karya Serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II	1 dok	300.000.000	1 dok	330.000.000	1 dok	363.000.000	1 dok	399.300.000	1 dok	439.230.000	Bidang KESOS			
								Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah															
								Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pentaan Batas Wilayah	1 dok	200.000.000	1 dok	220.000.000								Formulasi Judul dan waktu kegiatan		
								Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga															
								Koordinasi Persiapan POSPEDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas Persiapan POSPEDA di Kab./Kotase Wilayah II Provinsi Jawa Barat	1 dok	130.000.000	1 dok	143.000.000							Bidang KESOS			
								1	23	66		Program Pengembangan Nilai Budaya										formulasi	
												Koordinasi Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wil. II Prov. Jabar	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas Gelar Karya Serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II	1 dok	300.000.000	1 dok	330.000.000					Bidang KESOS	
2. Prosentse deviasi antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan dalam pelaksanaan proram/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah II	Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Kesepakatan dalam bidang: - Pemerintahan - Pembangunan - Perekonomian - Keejahteraa Sosial	1	06	29		Program Percanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Imolementasi Tematik Kewilayahan Oleh Kabupaten/Kota se Wilayah II		100%		100%		100%		100%		100%					
							Pengembangan Industri Manufaktur (TKW -21)	Jumlah Dokumen hasilPelaksanaan an Rapat Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Industri Manufaktur (TKW -21)	1 dok	100.000.000	1 dok	110.000.000	1 dok	121.000.000			1 dok		- Perekonomian				
							Pengembangan Industri Keramik Gerabah (TKW-22)	Jumlah Dokumen hasilPelaksanaan Rapat Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Industri Keramik Gerabah (TKW-22)	1 dok	100.000.000	1 dok	110.000.000	1 dok	121.000.000	1 dok	133.100.000	1 dok	146.410.000	Perekonomian				

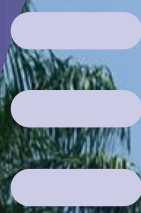
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERIA PENANGGUNG JAWAB	KET.	
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun - 5 (2018)				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
f						Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasilPelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Bagian Kegiatan Kabupaten/Kota			1dok	243.750.000									
						Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar dan Air Payau (TKW-23)							96.186.000							
							Imolementasi Tematik Kewilayahan Oleh SKPD Provinsi Jawa Barat		50%		60%		70%		80%		90%			
						Rapat Monotoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi, Pengembangan Industri makanolahan berbasis bahan baku lokal	Jumlah Dokumen Hasil Monotoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi, Pengembangan Industri makanolahan berbasis bahan baku lokal					1 dok	50.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	75.000.000	Bidang Perekonomian		
						Rapat Monotoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi, Pengembangan Industri Perberasan	Jumlah Dokumen Hasil Monotoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi, Pengembangan Industri Perberasan					1 dok	50.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	75.000.000	Bidang Perekonomian		
						Pelestarian Obyek Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) di Wilayah II Prov. Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelestarian Obyek Wisata Sejarah, Wisata Ziarah (Pilgrimage) di Wilayah II Prov. Jawa Barat		1 Dok	200.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	275.000.000				-	Bidang KESOS	
						Operasional Advisor Sinergi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan		1 dok	200.000.000	1 dok	220.000.000	1 dok	235.000.000					Bidang Perek.	
Misi Kedua : Menciptakan Kelembagaan BKPP II yang kuat dan profesional melalui peningkatan tatakelola lembaga dan kualitas sumberdaya aparatur																				
Mewujudkan kelembagaan BKPP Wilayah II yang Profesional dan akuntabel		Tersedia dan termanfatkannya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan kinerja Program dan Kegiatan internal BKPP Wil II	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta dokumen evaluasi dan pelaporan internal BKPP Wil II							100%		100%		100%		100%				
				1	20	59														
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
						Merencanakan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Internal BKPP Wil. II		26 dok	100.000.000	26 dok	110.000.000	26 dok	121.000.000	26 dok	133.100.000	26 dok	146.410.000		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KET.			
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun - 5 (2018)						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Prosentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Pembangunan Jawa barat Wilayah II							100%			100%			100%						
				1	24	66			Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah													
									Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II	Jumlah buku dan display Data Pembangunan Jawa Barat Wilayah II		50 buku dan 15 buah display data	100.000.000	50 buku dan 7 buah display data	110.000.000	50 buku dan 7 buah display data	121.000.000	50 buku dan 7buah display data	133.100.000	50 buku dan 7 buah display data	146.410.000	Sekretariat
		1.Terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dari segi keahlian dan kompetensinya	1. Prosentase pegawai yang diikutsertakan dalam dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, seminar, diklat dll	1	20	52			Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur		100%			100%		100%		100%				
									Peningkatan Kemampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang/pegawai yang diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, seminar, diklat dll		5 orang	100.000.000	5 orang	110.000.000	5 orang	121.000.000	5 orang	133.100.000	5 orang	146.410.000	sekretariat
									Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi JawaBarataan			450.000.000	65%	495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000	sekretariat	
		2. Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas	1. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm Perkantoran	1	20	53			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%			
									Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air Kantor BKPP Wilayah II	Kesinambungan Pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi Perkantoran , Daya listrik dan Air		12 bln	2.000.000.000	12 bln	2.200.000.000	12 bln	2.420.000.000	12 bln	2.662.000.000	12 bln	2.928.202.000	Sekretariat
			2. Prosentase realisasi Pengadaan dan ppeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	20	54			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		100%		100%		100%		100%			
									Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang BKPP Wil. II	Prosentase Penyelesaian Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang BKPP Wil. II		100%	1.000.000.000									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	KET.					
								Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun - 5 (2018)								
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						Mengadakan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jawa Barat		100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000						
						Rehabilitasi Gedung Negara,Gedung Sekretariat,dan Gedung Ratel.	Prosentase Penyelesaian Rehabilitasi Gedung Negara, Sekretariat dan ratel BKPP Wilayah II Prov. Jabar			100%	1.000.000.000							Sekretariat						
						3. Prosentase Realisasi Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1	20	55		Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur				100%		100%		100%					
											Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BKPP Wil. II Termasuk dalam Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman Serta Pagar.	Prosentase Penyelesaian Rehasabilitas Gedung Sekretariat Kantor BKPP Wilayah II termasuk Pemeliharaan Eksterior Gedung, Halaman serta Pagar			900.000.000	100%	990.000.000	100%	1.089.000.000	100%	1.197.900.000	100%	1.317.690.000	Sekretariat
														9.535.000.001,00		10.863.500.001		9.434.893.401		6.775.000.000		8.485.757.000		

KEPALA BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT

Ir. DEDDI MULYADI
NIP. 19580827 198603 1 014



RENCANA KERJA (RENJA)



2017



**BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT**

Alamat : Jln. Siliwangi No. 1 Purwakarta